BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human Development Indeks (HDI) merupakan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, atau dengan kata lain merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pembangunan manusia yang lebih berkualitas. HDI juga dapat disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Davies & Quinlivan, 2006).

Terdapat tiga komponen yang dapat digunakan untuk mengukur indeks pembangunan manusia, antara lain umur panjang dan hidup yang sehat (*a long and healty life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*desent standart of living*). Terdapat beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur indikator – indikator tersebut misalnya dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, untuk mengukur dimensi pendidikan gabungan dari indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dan untuk mengukur dimensi hidup yang layak dapat menggunakan indikator kemampuan ekonomi dari daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita dalam pencapaian hidup yang layak. (Hanif, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik, IPM mempunyai beberapa keunggulan atau kelebihan dimana indikator tersebut dapat mengukur tingkat keberhasilan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas hidup manusia selain itu IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembanugnan suatu wilayah atau negara, dapat menklasifikasikan apakah negara itu termasuk kedalam goongan maju, berkembang, atau terbelakang. Di Indonesia IPM merupakan salah satu data strategi karena dapat

mengukur kinerja pemerintah dan juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan sejumlah dana yang harus di alokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom (provinsi/ kabupaten/ kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Namun indikator tersebut dirasa masih kurang sesuai dengan keadaan negara di Indonesia, sehingga ukuran pembangunan manusia juga menjadi kurang akurat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, oleh karena itu untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan *Islamic Human Development Index* (I-HDI), di mana teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif Islam. (Rafjansani, 2012). Diketahui bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi dalam perspektif islam adalah untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif baik didunia dan akhirat atau yang disebut falah, berdasarkan tujuan tersebut dan beberapa karakteristik lain dari pengembangan eknomi islam maka indikator konvensional pembangunan ekonomi atau IPM menjadi tidak cukup untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi di negara muslim. Selain itu I-HDI merupakan indeks gabungan dari beberapa indikator yang berasal dari lima kebutuhan dasar untuk mencapai falah. Oleh karena itu, I-HDI menjadi memiliki kelebihan pada hasil pengukuran kualitas dan pembangunan manusia di suatu wilayah/negara jika dibandingkan dengan indikator lain seperti IPM.

Islamic Human Development Index (I-HDI) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mngetahui dan mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. I-HDI akan mengukur terkait bagaimana pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia tersebut agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (mencapai *falah*). I-HDI akan dibangun berdasarkan indikator – indikator yang mencerminkan dimensi imam asy-Syaṭibi. Terdapat lima

dimensi tersebut *Maqāṣid Syarī"ah* dalam pemeliharaan kebutuhan dasar, yaitu dengan pemeliharaan terhadap agama (*hifdzu ad-dien*), pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*hifdzu al-„aql*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan pemeliharaan terhadap harta (*hifdzu al-māl*). Beberapa hal tersebut merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi supaya manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (Rahmatullah, 2018).

Tingkat kemiskinan merupakan proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah atau negara. Hampir setiap wilayah atau negara mempunyai rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta garis kemiskinan di DI Yogyakarta pada September 2018 sebesar 414.899 rupiah perkapita per bulan dan dalam satu semester terakhir garis kemiskinan meningkat 1,26 persen dari kondisi Maret 2018 dimana garis kemiskinannya sebesar 409.744 rupiah perkapita perbulan. Jumlah penduduk miskin pada bulan September di DI Yogyakarta pada bulan September sebanyak 450,25 ribu orang dan 11,81 persen terhadap jumlah total penduduk DI Yogyakarta. (Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019). Garis kemiskinan dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. *Islamic Human Development Index* (I-HDI) merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah terkait tingkat kemiskinan masyarakat di provinsi DIY. Dimana setiap peningkatan angka I-HDI akan menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Semakin berkualitasnya masyarakat di provinsi DI Yogyakarta maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas kerja dari masyarakat, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan perolehan

pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmaraga, 2011) yang menyatakan bahwa I-HDI menunjukkan hubungan negatif signifikan.

Berdasarkan data tingkat kemiskinan provinsi DIY, dapat dilihat bahwa dari tahun 2009 provinsi DIY mempunyai tingkat kemiskinan yang berada diatas rata – rata nasional yakni di mana presentase penduduk miskin di DIY 17,23% sementara nasional berada di 14,15%. Selain tingkat kemiskinan, hal yang sama juga ditemukan pada rasio gini di provinsi DIY, yang juga berada diatas rata – rata rasio gini nasional yang dapat dilihat dari data rasio gini tahun 2009 provinsi DIY yakni di mana rasio gini di DIY 0,380 sementara rasio gini nasional berada di 0,370.

Rasio gini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, dalam hal ini adalah terkait distribusi pemerataan pendapatan masyarakat. Rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz dimana kurva Lorenz yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi suatu variabel tertentu dengan ditribusi uniform yang mewakilkan persentase kumulatif penduduk. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, rasio gini mengalami peningkatan dibandingkan kondisi pada semester yang lalu. Dimana angka rasio gini pada bulan Maret 2018 provinsi DI Yogyakarta tercatat sebesar 0,441 dan meningkat 0,001 poin dibandingkan dengan bulan September 2017. Rasio gini merupakan alat ukur pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Di mana setiap peningkatan angka I-HDI akan berakibat meningkatkan kualitas dan pembangunan masyarakat. Hal tersebut akan berakibat pada semakin baiknya produktivitas kerja dari masyarakat. Perbaikan produktivitas kerja masyarakat ini akan meningkatkan pemerataan disribusi perolehan pendapatan masyarakat dari berbagai golongan (bawah, menengah, atas) sehingga menurunkan nilai rasio gini. (Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019)

Beberapa data dari Badan Pusat Statistik tersebut menjadikan salah satu alasan mengapa peneliti melakukan penelitian. Selain itu, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu maka perlu dilakukan penelitian ulang dengan menggunakan data terbaru yang ditinjau dari beberapa aspek terkait *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan dan rasio gini di DI Yogyakarta, sehingga nantinya dapat dijadikan kesimpulan yang lebih akurat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah supaya lebih memperhatikan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan pada masyarakat sekitar dengan melihat dari beberapa aspek seperti angka kriminalitas, angka harapan hidup, pengeluaran perkapita dan lain sebagainya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka secara terperinci rumusan dalam masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta tahun 2009-2018?
2. Bagaimana pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap rasio gini di DI Yogyakarta tahun 2009-2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta pada tahun 2009-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap rasio gini di DI Yogyakarta pada tahun 2009-2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini dapat dibagi atas dua aspek yaitu:

1. Pihak Peneliti

   Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti dan pembaca terkait konsep Islamic Human Development Index. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pengaruh Islamic Human Development Index terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di DI Yogyakarta. Penelitian ini juga telah mengimplementasikan teori – teori yang sudah didapatkan peneliti selama di bangku kuliah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pembanding bagi penelitian– penelitian terdahulu.

2. Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang ekonomi terutama dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh bentuk skripsi yang sistematis dan memberikan gambaran mengenai pembahasan skripsi ini, maka penyusun akan menguraikan sistematika penulisan skripsi dan membahas penelitian ini ke dalam lima bab. Berikut adalah penjelasannya:

Bab I, bab ini merupakan uraian dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yang merupakakn uraian penjelasan dari masalah yang ada dalam penelitian ini. Kemudian terdapat rumusan masalah guna menjelaskan masalah – masalah dan rumusan pertanyaan dari penelitian ini. Dari rumusan masalah maka dihasilkan tujuan dan manfaat dari ditulis dan disussunnya penelitian ini.

Bab II, bab ini merupakakn uraian dari landasan teori yang terdiri dari telaah pustaka yang merupakan penjelasan dari penelititan – penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh I-HDI terhadap tingkat kemiskinan dan rasio gini. Kemudian juga terdapat landasan teori yang berisi uraian teori yang berkaitan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini. Penulis juga menyantumkan kerangka berfikir guna memetakan sistematika dari kerangka penelitian yang digunakan dalam penelititan. Pada uraian bab II penulis menyantumkan rumusan hipotesis yang akan menjelaskan beberapa uraian terkait hipotesis – hipotesis yang ada dalam penelitian ini.

Bab III, bab ini merupakan uraian dari metode penelitian yang menjelaskan terkait populasi dan sampel, serta metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV, bab ini merupakan uraian dari data yang telah dihasilkan atau diuji yang terdiri dari hasil analisis data dari analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitaas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas. Kemudian juga diuraikan hasil dari analisis regresi sederhana, koefisien determinasi (R2), dan uji hipotesis yakni uji t yang hasilnya akan dibandingkan dengan hipotesis – hipotesis yang ada pada penelitian ini.

Bab V, bab ini merupakan uraian dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.